



SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/..99/PL.01/II/2019

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM DAN
KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

- Membaca : Rencana Kerja Anggaran Kementrian/ Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-005.03.2.099255/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Nomor: SP DIPA-005.01.2.099202/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
2. Bahwa dalam rangka merealisasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yaitu Pos Bantuan Hukum pada DIPA Nomor: SP DIPA-005.03.2.099255/2019 dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yaitu Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop pada DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.099202/2019 Pengadilan Negeri Kandangan;
3. Bahwa dengan akan dimulainya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, perlu segera ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Saudara M. Andriansyah, ST. SH., NIP.198212242009121004, Jabatan Staf Sub Bagian Kepegawaian dan IT pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yaitu Pos Bantuan Hukum dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Kandangan yaitu Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2019.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 8 Februari 2019

Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



INDRIATI, S.Sos.

NIP. 196709111999032001

Tembusan Yth:

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Di Banjarbaru
2. Bapak Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kal-Sel
Di Banjarbaru
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
(Sebagai Laporan)
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Kandangan
5. Arsip



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan Telp (0517) 21024 – 21032

Kandangan 71211

Website : <http://pn-kandangan.go.id>, e-mail : pn_kandangan@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/ 6/ /PA/SK/I/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA, STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) DAN OPERATOR DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2019

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan tahun anggaran 2019;

b. Bahwa pejabat tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penanggungjawab kegiatan/pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penguji surat permintaan pembayaran (SPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Staf Pengelola keuangan dan petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) dan Operator di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan tahun anggaran 2019;

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
4. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400)
6. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 75, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 4406);
7. Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung RI;

8. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peratran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Keputusan Presiden RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
14. Keputusan Presiden RI Nomor: 56Tahun 2004 tentang pengadilah organisasi, administrasi dan finansial peradilan dalam lingkungan peradilan militer dan markas besar tentara nacional indonesia ke Mahkamah Agung RI;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor : 103, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 5423);
17. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2019

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

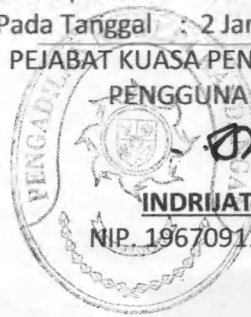
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Operator di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor : W15.U2/05/PA/SK/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Indriati
INDRIATI, S.Sos

NIP. 196709111999032001



Lampiran

Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Negeri Kandangan

Nomor : W15.U2/ 01/PA/SK/I/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan dalam DIPA Th. 2017	Besarnya Tunjangan	Ket.
1.	Rafiqah, ST.	197901202006042002	Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 650.000,-	
2.	Ivonne Sari Indah, S.Si	199105112014032002	Penata Muda (III/a)	Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan SPM	Rp. 650.000,-	
3.	Noorlaila Wardhani	198204262014082001	Pengatur Muda Tk.I (II/a)	Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	Rp. 770.000,-	
4.	Herarias	196810161992031004	Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan Bendahara Penerima	Rp. 570.000,-	
5.	Ayu Pratiwi Sutopo,SE	-	-	Staf Pengelola Keuangan Operator SAIBA	Rp. 570.000,-	
6.	Dwi Mutia Puspita,S Pd	-	-	Staf Pengelola Keuangan Operator SIMAK BMN	Rp. 570.000,-	

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 2 Januari 2019

PEJABAT KUASA PENGGUNA

ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN


Indrijati
INDRIJATI, S.Sos
NIP. 196709111999032001